

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Migrasi internasional merupakan salah satu fenomena paling menonjol dalam dinamika global kontemporer dan telah menjadi isu krusial dalam studi Hubungan Internasional. Perpindahan manusia lintas negara semakin meningkat akibat konflik bersenjata, ketimpangan ekonomi, ketidakstabilan sosial-politik, dan perubahan iklim yang mengancam keberlanjutan hidup masyarakat rentan. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan meningkatnya mobilitas global, tetapi juga menunjukkan ketidakseimbangan antara kebutuhan perlindungan manusia dan kepentingan kedaulatan negara. Seperti dijelaskan oleh Chuang (2023), tata kelola migrasi global dihadapkan pada tarik-menarik antara solidaritas internasional dan logika kontrol negara, sehingga nilai kemanusiaan universal sering kali dikompromikan dalam praktik birokrasi dan kebijakan nasional.

Dalam konteks tersebut, muncul kebutuhan akan tata kelola kemanusiaan (*humanitarian governance*) yang lebih berkeadilan, responsif terhadap kebutuhan kelompok migran, serta konsisten dengan prinsip hak asasi manusia. Namun realitas menunjukkan bahwa implementasi tata kelola migrasi tidak selalu berjalan sejalan dengan idealisme normatif global. Banyak negara mengadopsi kebijakan yang bersifat protektif, membatasi akses perlindungan bagi populasi migran yang dianggap tidak memberikan nilai ekonomi atau membebani anggaran publik. Ketegangan antara prinsip dan praktik inilah yang menjadikan migrasi sebagai isu multidimensi dalam studi Hubungan Internasional.

Fenomena tersebut semakin kompleks di kawasan Asia Pasifik yang memiliki karakter migrasi unik, hasil dari kombinasi warisan kolonial, keterbatasan ekonomi negara kepulauan kecil, serta kerentanan terhadap perubahan iklim. Negara-negara seperti Federated States of Micronesia (FSM), Republic of the Marshall Islands (RMI), dan Palau memiliki hubungan historis dengan Amerika Serikat yang kemudian dilembagakan melalui perjanjian

Compact of Free Association (COFA). Perjanjian ini memberikan hak kepada warga negara COFA untuk bekerja dan tinggal di wilayah Amerika Serikat tanpa visa, sementara AS memperoleh keistimewaan strategis dalam bidang pertahanan (Hezel, 2013; U.S. *Department of State*, 2023). Akibatnya, migrasi warga Mikronesia ke daerah seperti Guam dan Hawai‘i meningkat signifikan, terutama karena tekanan ekonomi dan degradasi lingkungan yang terjadi di negara asal (McElfish et al., 2019).

Keterkaitan antara mobilitas tersebut dan hubungan historis yang melatarbelakanginya tidak dapat dilepaskan dari peran Amerika Serikat dalam pengelolaan kawasan Pasifik pasca-Perang Dunia II. Wilayah-wilayah Mikronesia sebelumnya berada di bawah skema *Trust Territory of the Pacific Islands* (TTPI) yang dikelola oleh Amerika Serikat di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dengan mandat untuk mendorong pembangunan dan menuju *self-determination*. Namun, sejumlah kajian menunjukkan bahwa proses tersebut tidak sepenuhnya menghasilkan kemandirian yang setara, melainkan meninggalkan ketergantungan ekonomi dan struktural yang berkelanjutan (Hezel, 1995; Hanlon, 2023).

Dalam perkembangan selanjutnya, hubungan tersebut dilembagakan melalui COFA, yang secara formal memberikan kebebasan mobilitas bagi warga negara-negara Pasifik ke Amerika Serikat. Namun, sebagaimana dikemukakan oleh Achiume (2019), mobilitas dari wilayah bekas koloni ke negara yang memiliki keterkaitan historis tidak dapat dipahami semata-mata sebagai fenomena migrasi biasa, melainkan sebagai bagian dari relasi global yang terbentuk melalui sejarah kolonialisme. Dengan demikian, arus migrasi dari FSM ke Hawai‘i juga merefleksikan keterhubungan historis yang lebih dalam, yang tidak hanya membentuk pola mobilitas, tetapi juga memengaruhi bagaimana migrasi tersebut diposisikan dalam konteks sosial dan kebijakan di wilayah tujuan.

Hawai‘i menempati posisi geopolitik dan sosiohistoris yang unik dalam konteks ini. Secara administratif merupakan bagian dari Amerika Serikat, namun Hawai‘i memiliki sejarah kolonial, pengalaman aneksasi, serta identitas budaya yang berbeda dari negara bagian AS lainnya. Arus migrasi dari Asia

dan Pasifik selama beberapa dekade telah membentuk struktur demografis yang sangat beragam. Populasi Filipina kini menjadi salah satu kelompok terbesar di Hawai‘i, sementara persentase *Native Hawaiian* terus mengalami penurunan relatif (Okamura, 2023). Kondisi ini menciptakan ruang sosial yang kompleks, ditandai oleh persaingan akses terhadap sumber daya publik, meningkatnya biaya hidup, serta perdebatan mengenai identitas budaya dan keberlanjutan tanah leluhur.

Dinamika tersebut berlangsung dalam konteks marginalisasi historis masyarakat *Native Hawaiian*. Sejak aneksasi Hawai‘i oleh Amerika Serikat, *Native Hawaiian* mengalami kehilangan kedaulatan politik, komodifikasi tanah, serta ketimpangan akses terhadap perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Marginalisasi ini bersifat struktural dan telah berlangsung jauh sebelum meningkatnya arus migrasi COFA. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menempatkan *Native Hawaiian* sebagai subjek utama atau sudut pandang analisis, melainkan sebagai konteks historis-struktural yang membentuk sensitivitas sosial dan persepsi publik di Hawai‘i. Kehadiran migran COFA tidak diposisikan sebagai penyebab utama marginalisasi tersebut, melainkan terjadi dalam ruang sosial yang telah lebih dahulu ditandai oleh ketidakadilan struktural. Posisi historis tersebut berkontribusi pada terbentuknya sensitivitas sosial yang tinggi terhadap isu distribusi sumber daya publik di Hawai‘i, khususnya terkait perumahan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, kedatangan kelompok migran baru, termasuk migran COFA, sering kali dipersepsikan melalui lensa ketidakadilan historis yang belum terselesaikan, alih-alih semata-mata sebagai fenomena migrasi kontemporer. Dengan demikian, sikap masyarakat penerima tidak dapat dipahami secara terlepas dari memori kolektif kolonialisme dan marginalisasi yang terus membentuk relasi sosial di Hawai‘i (Trask, 1999; Goodyear-Ka‘ōpua, 2014).

Masuknya migran COFA ke Hawai‘i mempertegas ketegangan ini. Di satu sisi, mereka memiliki hak legal untuk tinggal dan bekerja berdasarkan COFA. Namun di sisi lain, banyak penelitian menunjukkan bahwa migran COFA menghadapi hambatan struktural, seperti keterbatasan akses kesehatan,

keterpinggiran ekonomi, dan diskriminasi sosial. McElfish et al. (2019) menemukan bahwa sebagian besar migran COFA di Hawai'i tidak memiliki asuransi kesehatan dan menghadapi kendala dalam mengakses layanan publik. Perubahan kebijakan Medicaid pada tahun 2010 juga sempat mengecualikan mereka dari cakupan layanan kesehatan federal, hingga dipulihkan kembali melalui *Restoration Act* pada tahun 2021 (U.S. Congress, 2021). Kondisi ini memperlihatkan adanya kontradiksi antara prinsip perlindungan kemanusiaan dan implementasi kebijakan publik di Hawai'i.

Di tingkat masyarakat, ketegangan menjadi lebih terasa. Komunitas migran Mikronesia sering kali distigmatisasi dan menghadapi stereotip negatif yang membatasi proses integrasi mereka (Rehuher, 2021). Persepsi bahwa migran COFA membebani anggaran negara bagian semakin diperkuat oleh laporan *Hawai'i Department of Human Services* (2017) yang menyebutkan biaya layanan publik bagi migran COFA mencapai lebih dari 163 juta dolar per tahun. Sementara itu, kompensasi federal yang diterima Hawai'i dianggap tidak sebanding. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa keberadaan migran COFA menjadi beban fiskal yang mempengaruhi sikap sebagian masyarakat lokal (Haas & Vogt, 2018). Di sisi lain, kelompok *Native Hawaiian* memandang meningkatnya migrasi sebagai ancaman terhadap sumber daya publik dan identitas budaya lokal yang semakin terpinggirkan.

Meskipun banyak studi membahas dampak ekonomi COFA, kondisi sosial migran Mikronesia, serta hambatan kesehatan dan kesejahteraan mereka, masih sangat sedikit penelitian yang secara komprehensif menjelaskan bagaimana kebijakan COFA membentuk sikap masyarakat Hawai'i sebagai populasi penerima. Kajian-kajian sebelumnya cenderung berfokus pada migran sebagai objek analisis, bukan pada respons, persepsi, dan dinamika masyarakat lokal yang juga terkena dampak langsung. Sengketa wacana antara idealisme kemanusiaan global (seperti yang dipromosikan IOM) dan realitas sosial Hawai'i pun belum dibahas secara eksplisit dalam pendekatan Hubungan Internasional.

Selain hambatan akses kesehatan dan kesejahteraan sosial, literatur mengenai COFA lebih banyak menitikberatkan pada kondisi migran

Mikronesia, seperti dampak ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, sementara dampaknya terhadap sikap dan respons masyarakat Hawai'i sebagai populasi penerima masih relatif kurang mendapat perhatian. Salah satu dampak tersebut muncul dalam bentuk kerentanan sosial ekstrem yang dialami sebagian migran COFA di ruang publik, khususnya dalam isu tunawisma di Honolulu. Dampak kebijakan COFA di Hawai'i juga tercermin dalam meningkatnya kerentanan migran Mikronesia terhadap kondisi tunawisma, khususnya di Honolulu. Gard (2017) mencatat bahwa migran COFA terwakili secara tidak proporsional dalam populasi tunawisma, dengan estimasi sekitar 20 persen dari tunawisma di Honolulu berasal dari komunitas ini. Kerentanan tersebut berkaitan erat dengan tingginya biaya hidup dan perumahan di Hawai'i, serta keterbatasan akses terhadap jaring pengaman sosial akibat kebijakan federal yang lama mengecualikan migran COFA dari Medicaid. McElfish et al. (2015; 2019) menunjukkan bahwa ketidakamanan kesehatan dan ekonomi yang dihasilkan oleh kebijakan tersebut meningkatkan risiko kemiskinan ekstrem dan kehilangan tempat tinggal. Dalam konteks sosial Hawai'i, kondisi tunawisma ini kemudian berkontribusi pada pembentukan stigma dan persepsi negatif terhadap migran COFA, yang memperkuat ketegangan antara masyarakat lokal dan komunitas migran. Keberadaan tunawisma di ruang publik menjadikan kerentanan sosial migran COFA semakin terlihat (*visible*), yang dalam banyak kasus berkontribusi pada pembentukan stigma dan generalisasi negatif. Studi mengenai persepsi publik terhadap migrasi menunjukkan bahwa visibilitas kemiskinan sering kali dikaitkan dengan atribusi moral dan penilaian terhadap "kelayakan" migran dalam menerima bantuan negara. Dalam konteks Hawai'i, kondisi ini memperkuat narasi beban fiskal dan mempersempit ruang empati publik terhadap migran COFA, meskipun kerentanan tersebut berakar pada desain kebijakan struktural, bukan semata-mata pilihan individual (Tyler, 2020; Rehuher, 2021).

Persepsi publik memainkan peran sentral dalam keberhasilan integrasi migran, membentuk arah kebijakan lokal, serta mempengaruhi hubungan antara pemerintah federal dan negara bagian. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi ruang kosong tersebut dengan menelaah bagaimana kebijakan COFA

membentuk dinamika sosial antara masyarakat Hawai'i dan migran Mikronesia. Terlihat bahwa kebijakan COFA tidak hanya mengatur mobilitas warga Mikronesia, tetapi juga membentuk ruang interaksi sosial yang kompleks di Hawai'i. Akses legal yang diberikan melalui perjanjian tersebut pada praktiknya beririsan dengan berbagai faktor mulai dari beban ekonomi negara bagian, persepsi mengenai keadilan distribusi layanan publik, hingga sensitivitas budaya dan identitas lokal yang terus dinegosiasikan. Ketegangan antara prinsip kemanusiaan yang ideal dan realitas implementasi kebijakan di lapangan menjadikan hubungan antara masyarakat Hawai'i dan migran Mikronesia sebagai arena yang sarat dinamika dan layak untuk ditelaah lebih mendalam.

Penelitian ini berupaya menelusuri bagaimana sikap masyarakat Hawai'i terbentuk dalam konteks kebijakan COFA serta bagaimana pengalaman sosial yang muncul di antara kedua kelompok tersebut mencerminkan perjumpaan antara nilai-nilai global dan kondisi lokal. Dengan melihat bagaimana arus migrasi COFA diterima, dinegosiasikan, atau justru menimbulkan jarak sosial di tingkat masyarakat, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai realitas sosial yang berkembang di Hawai'i. Tampak bahwa kebijakan COFA tidak hanya mengatur mobilitas warga Mikronesia, tetapi juga membentuk ruang interaksi sosial yang kompleks di Hawai'i. Akses legal yang diberikan melalui perjanjian tersebut pada praktiknya beririsan dengan berbagai faktor, mulai dari beban ekonomi negara bagian, persepsi mengenai keadilan distribusi layanan publik, hingga sensitivitas budaya dan identitas lokal yang terus dinegosiasikan. Ketegangan antara prinsip kemanusiaan yang ideal dan realitas implementasi kebijakan di lapangan menjadikan hubungan antara masyarakat Hawai'i dan migran Mikronesia sebagai arena yang sarat dinamika dan layak untuk ditelaah lebih mendalam sekaligus membuka ruang refleksi yang lebih luas mengenai bagaimana kebijakan migrasi internasional bekerja di tingkat lokal dan bagaimana masyarakat merespons perubahan sosial yang ditimbulkannya. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika tersebut diharapkan dapat membantu merumuskan pendekatan yang lebih sensitif terhadap konteks budaya, lebih

adil dalam distribusi layanan publik, serta lebih selaras dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang menjadi dasar terbentuknya perjanjian COFA itu sendiri.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menelusuri bagaimana kebijakan COFA membentuk dinamika sosial antara masyarakat Hawai'i dan migran Mikronesia, khususnya dalam konteks ketegangan antara prinsip kemanusiaan global dan realitas implementasi kebijakan di tingkat lokal. Dengan menempatkan posisi historis *Native Hawaiian* sebagai konteks struktural dan menelaah isu-isu seperti beban fiskal, persepsi keadilan distribusi layanan publik, serta kerentanan sosial seperti tunawisma, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana kebijakan migrasi internasional bekerja dalam praktik.

Oleh karena itu, penelitian ini berjudul **“Pengaruh Kebijakan *Compact of Free Association* (COFA) Terhadap Resistensi Imigran *Federated States Of Micronesia* di Hawaii Amerika Serikat”**, yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan migrasi internasional yang bersifat legal-formal tersebut membentuk dinamika sosial, persepsi publik, dan hubungan antara masyarakat penerima dan komunitas migran di Hawai'i dalam konteks ketegangan antara prinsip kemanusiaan global dan realitas implementasi kebijakan di tingkat lokal.

1.2 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana masyarakat *Native Hawaiian* memaknai dampak kebijakan *Compact of Free Association* (COFA) terhadap kehidupan sosial dan budaya lokal di Hawai'i?
2. Bagaimana kebijakan COFA dan arus migrasi Mikronesia dikonstruksikan dalam wacana sosial sebagai isu yang berkaitan dengan ancaman terhadap identitas dan keberlanjutan masyarakat *Native Hawaiian*?
3. Faktor-faktor apa yang memengaruhi terbentuknya sikap dan persepsi masyarakat *Native Hawaiian* terhadap migran Mikronesia dalam konteks kebijakan COFA?

1.3 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada periode 2021–2024, yaitu masa terjadinya perubahan penting dalam kebijakan COFA di Hawai‘i, khususnya pemulihan akses Medicaid bagi migran COFA dan meningkatnya wacana publik mengenai dampak migrasi Mikronesia. Secara geografis, penelitian difokuskan pada Negara Bagian Hawai‘i sebagai wilayah penerima utama migran Mikronesia. Ruang lingkup penelitian menempatkan masyarakat *Native Hawaiian* sebagai subjek analisis, dengan fokus pada bagaimana mereka memaknai dampak kebijakan COFA dan arus migrasi Mikronesia terhadap kehidupan sosial, budaya, dan identitas lokal. Penelitian ini memahami sikap dan persepsi tersebut dalam konteks marginalisasi historis dan ketimpangan struktural yang telah berlangsung sejak aneksasi Hawai‘i, tanpa menilai benar atau salahnya sikap masyarakat *Native Hawaiian* terhadap migran Mikronesia. Penelitian ini dibatasi pada dimensi sosial, kultural, dan diskursif yang membentuk persepsi dan sikap masyarakat *Native Hawaiian*, serta tidak mencakup analisis pertahanan dan keamanan COFA, negosiasi bilateral Amerika Serikat–negara COFA, maupun aspek ekonomi makro yang berada di luar fokus penelitian.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana masyarakat *Native Hawaiian* memaknai dampak kebijakan *Compact of Free Association* (COFA) terhadap kehidupan sosial dan budaya lokal di Hawai‘i. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kebijakan COFA dan arus migrasi Mikronesia dikonstruksikan dalam wacana sosial sebagai isu yang berkaitan dengan ancaman terhadap identitas dan keberlanjutan masyarakat *Native Hawaiian*.

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi terbentuknya sikap dan persepsi masyarakat *Native Hawaiian* terhadap migran Mikronesia

dalam konteks kebijakan COFA. Melalui tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika hubungan antara kebijakan migrasi internasional dan konstruksi sosial di tingkat lokal.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian Hubungan Internasional, khususnya dalam studi migrasi internasional dan tata kelola kemanusiaan. Penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai hubungan antara norma kemanusiaan global dan dinamika sosial lokal, serta menunjukkan bagaimana kebijakan migrasi internasional membentuk relasi sosial di tingkat masyarakat.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman empiris mengenai pengalaman sosial dan interaksi antara masyarakat Hawai'i dan komunitas migran Mikronesia. Temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh akademisi, peneliti, dan organisasi masyarakat sipil sebagai bahan rujukan dalam mengembangkan program integrasi sosial, edukasi publik, dan inisiatif komunitas yang lebih inklusif serta sensitif terhadap konteks lokal.

1.5 Kerangka Teoritis-Konseptual

1.5.1 Konstruktivisme

Dalam kajian hubungan internasional, konstruktivisme dipahami sebagai pendekatan yang menekankan bahwa realitas politik dan sosial internasional tidak bersifat objektif atau *given*, melainkan dibentuk melalui proses interaksi sosial, norma, identitas, dan pemaknaan bersama. Berbeda dengan pendekatan materialis, konstruktivisme melihat bahwa kepentingan dan perilaku aktor tidak muncul secara alamiah, tetapi dikonstruksikan melalui pengalaman historis, praktik sosial, serta diskursus yang berkembang di dalam masyarakat (Wendt, 1992; Adler, 1997).

Salah satu kontribusi utama konstruktivisme adalah penekanannya pada peran identitas dalam membentuk kepentingan dan persepsi aktor. Wendt (1992) menegaskan bahwa struktur internasional bukan hanya terdiri dari distribusi kekuatan material, tetapi juga dari struktur ideasional yang membentuk bagaimana aktor memahami diri mereka sendiri dan pihak lain. Dengan demikian, konsep ancaman, keamanan, maupun kerja sama tidak dapat dilepaskan dari proses intersubjektif yang membangun makna sosial. Identitas kolektif ini kemudian memengaruhi bagaimana suatu kelompok merespons fenomena tertentu, termasuk migrasi dan kebijakan internasional.

Dalam konteks penelitian ini, kebijakan COFA tidak hanya dipahami sebagai perjanjian hukum antara Amerika Serikat dan negara-negara Mikronesia, tetapi sebagai struktur normatif yang membentuk relasi sosial, politik, dan simbolik di Hawai'i. Arus migrasi Mikronesia yang difasilitasi oleh COFA tidak secara otomatis menghasilkan penerimaan atau penolakan, sebaliknya, respon *masyarakat Native Hawaiian* terbentuk melalui cara migrasi tersebut dimaknai dalam konteks lokal yang sarat dengan pengalaman kolonialisme, marginalisasi, dan ketimpangan struktural (Goodyear-Ka'ōpua, 2014; Trask, 1999).

Pendekatan realisme dinilai kurang memadai untuk menjelaskan fenomena ini. Realisme menempatkan negara sebagai aktor utama dan menekankan kepentingan nasional, kekuasaan, serta keamanan material sebagai variabel utama dalam analisis hubungan internasional (Morgenthau, 1948; Waltz, 1979). Dalam kerangka realis, COFA cenderung dipahami sebagai instrumen strategis Amerika Serikat untuk mempertahankan kepentingan geopolitik dan keamanan di kawasan Pasifik. Namun, pendekatan ini tidak mampu menjelaskan bagaimana kebijakan tersebut berdampak pada dinamika sosial di tingkat lokal, khususnya bagaimana masyarakat *Native Hawaiian* memaknai kehadiran migran Mikronesia sebagai ancaman terhadap identitas, tanah adat, dan keberlanjutan komunitas mereka. Realisme juga

cenderung mengabaikan aktor non-negara dan dinamika identitas, sehingga kurang sensitif terhadap konflik yang bersumber dari pengalaman historis dan konstruksi sosial.

Sementara itu, pendekatan liberalisme memberikan perhatian pada institusi, kerja sama, dan hak individu, juga memiliki keterbatasan dalam menjelaskan dinamika sosial yang berakar pada identitas dan sejarah kolonial. Liberalisme melihat kebijakan seperti COFA sebagai mekanisme kerja sama yang saling menguntungkan, serta migrasi sebagai proses yang dapat dikelola melalui institusi dan kebijakan publik yang efektif (Keohane & Nye, 2001). Namun, pendekatan ini cenderung berasumsi bahwa aktor bersikap rasional dan bahwa institusi mampu meredam konflik, tanpa cukup memperhitungkan bagaimana ketimpangan historis dan relasi kuasa kolonial membentuk persepsi masyarakat terhadap migran. Akibatnya, liberalisme kurang mampu menjelaskan mengapa kebijakan yang secara normatif legal dan kooperatif justru memunculkan resistensi sosial, stigma, dan konflik simbolik di tingkat lokal.

Sehingga konstruktivisme memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap bagaimana makna migrasi COFA dikonstruksikan secara sosial dalam masyarakat Hawai'i. Katzenstein (1996) menekankan bahwa norma dan identitas domestik memainkan peran penting dalam membentuk respon politik suatu komunitas terhadap isu internasional. Dalam konteks ini, sikap masyarakat *Native Hawaiian* terhadap migran Mikronesia tidak hanya berkaitan dengan tekanan ekonomi atau kompetisi sumber daya, tetapi juga dengan bagaimana migrasi tersebut diposisikan dalam narasi tentang kolonialisme, kehilangan kedaulatan, dan marginalisasi berkelanjutan.

Finnemore (1996) menjelaskan bahwa norma internasional tidak bekerja secara mekanis, melainkan diinterpretasikan dan dinegosiasikan dalam konteks sosial tertentu. COFA sebagai perjanjian internasional berinteraksi dengan konteks lokal Hawai'i yang memiliki sejarah panjang penjajahan dan perampasan tanah adat. Interaksi ini

membentuk wacana yang mengaitkan migrasi Mikronesia dengan ancaman terhadap identitas kolektif *Native Hawaiian*, terutama dalam isu akses terhadap perumahan, layanan kesehatan, dan ruang hidup. Proses inilah yang menjelaskan mengapa migrasi tidak sekadar dipahami sebagai fenomena demografis, tetapi sebagai isu yang menyentuh dimensi eksistensial komunitas lokal.

Melalui lensa konstruktivisme, sikap masyarakat *Native Hawaiian* terhadap migran Mikronesia dipahami sebagai hasil dari proses konstruksi sosial ancaman, di mana pengalaman historis kolonialisme dan marginalisasi menjadi kerangka utama dalam memaknai kebijakan COFA. Persepsi ancaman ini tidak bersifat objektif atau universal, tetapi terbentuk melalui diskursus publik, pengalaman sehari-hari, serta narasi kolektif yang terus direproduksi dalam ruang sosial (Buzan, Wæver, & de Wilde, 1998). Dengan demikian, konstruktivisme memberikan ruang analitis untuk memahami bagaimana isu migrasi dapat bergeser dari ranah kebijakan sosial ke ranah identitas dan keamanan komunitas.

Berdasarkan pemikiran tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa konstruktivisme yang paling relevan untuk menganalisis dampak kebijakan COFA terhadap sikap masyarakat *Native Hawaiian*. Ini memungkinkan penelitian untuk melihat hubungan antara kebijakan internasional, arus migrasi, dan konteks historis kolonial sebagai proses sosial yang saling terkait. Dengan demikian, COFA tidak hanya dipahami sebagai perjanjian politik antarnegara, tetapi sebagai praktik sosial yang membentuk relasi kuasa, identitas, dan makna di tingkat lokal, khususnya dalam dinamika penerimaan dan penolakan terhadap migran Mikronesia di Hawai'i.

1.5.2 Teori Sekuritisasi

Teori sekuritisasi berkembang dalam tradisi konstruktivisme kritis, khususnya melalui kontribusi *Copenhagen School*, yang melihat keamanan bukan sebagai kondisi objektif, melainkan sebagai hasil dari proses sosial dan diskursif. Menurut Buzan, Wæver, dan de Wilde

(1998), suatu isu menjadi isu keamanan bukan karena ancaman tersebut bersifat material atau nyata secara objektif, tetapi karena ia dikonstruksikan sebagai ancaman eksistensial terhadap suatu *referent object* melalui praktik wacana tertentu. Dengan kata lain, sekuritisasi terjadi ketika suatu aktor berhasil mempresentasikan isu tertentu sebagai ancaman serius yang membutuhkan respons.

Wæver (1995) memperkenalkan konsep *speech act* sebagai inti dari proses sekuritisasi, di mana pernyataan mengenai ancaman tidak sekadar bersifat deskriptif, tetapi performatif. Melalui bahasa, simbol, dan narasi, suatu isu dipindahkan dari ranah politik normal ke ranah keamanan. Namun, keberhasilan sekuritisasi tidak hanya bergantung pada aktor yang menyampaikan ancaman, melainkan juga pada penerimaan audiens (*Native Hawaiian*) terhadap klaim tersebut (Balzacq, 2005). Dengan demikian, sekuritisasi merupakan proses intersubjektif yang melibatkan relasi kuasa, legitimasi, dan konteks sosial.

Dalam literatur sekuritisasi, konsep *threat* (ancaman) tidak dipahami sebagai sesuatu yang bersifat tetap atau universal. Ancaman dibentuk melalui interpretasi sosial yang dipengaruhi oleh sejarah, pengalaman kolektif, dan identitas kelompok (Buzan et al., 1998). Ancaman dapat bersifat non-militer, termasuk ancaman terhadap identitas budaya, kohesi sosial, atau keberlanjutan komunitas. Oleh karena itu, teori sekuritisasi membuka ruang analisis terhadap isu-isu seperti migrasi, identitas etnis, dan distribusi sumber daya sebagai isu keamanan, meskipun tidak berkaitan langsung dengan kekerasan fisik.

Lebih lanjut, identitas memiliki peran sentral dalam proses sekuritisasi. McSweeney (1999) menekankan bahwa keamanan selalu berkaitan dengan pertanyaan “siapa kita” dan “apa yang harus dilindungi”. Dalam konteks ini, sekuritisasi sering kali beroperasi melalui pembentukan dikotomi antara *in-group* dan *out-group*, di mana kelompok lain dikonstruksikan sebagai sumber ketidakamanan terhadap identitas kolektif. Proses ini tidak selalu bersifat eksplisit atau

formal, tetapi dapat berlangsung melalui narasi sehari-hari, media, dan pengalaman sosial yang berulang.

Balzacq (2011) juga menyoroti bahwa sekuritisasi tidak hanya bekerja di level negara, tetapi dapat terjadi di tingkat masyarakat dan komunitas. Pendekatan ini relevan untuk memahami bagaimana kelompok non-negara dapat mengonstruksikan isu tertentu sebagai ancaman terhadap eksistensi mereka, terutama dalam konteks masyarakat yang memiliki sejarah marginalisasi. Dengan demikian, sekuritisasi tidak harus melibatkan kebijakan darurat negara, tetapi dapat termanifestasi dalam sikap sosial, resistensi, dan eksklusi simbolik.

Dalam penelitian ini, sekuritisasi digunakan untuk memahami bagaimana migrasi Mikronesia yang difasilitasi oleh kebijakan COFA dikonstruksikan sebagai ancaman oleh sebagian masyarakat *Native Hawaiian*. Ancaman tersebut tidak semata-mata dipahami dalam kerangka ekonomi atau material, tetapi sebagai ancaman terhadap identitas, hak atas tanah, dan keberlanjutan komunitas adat. Pengalaman kolonialisme, kehilangan kedaulatan, dan keterbatasan akses terhadap sumber daya publik menjadi konteks penting yang membentuk cara migrasi dimaknai sebagai isu keamanan sosial dan kultural.

Melalui lensa sekuritisasi, persepsi ancaman terhadap migran Mikronesia dipahami sebagai hasil dari proses diskursif yang mengaitkan kehadiran migran dengan tekanan terhadap perumahan, layanan kesehatan, dan ruang hidup, yang kemudian diproyeksikan sebagai ancaman eksistensial terhadap *Native Hawaiian*. Dalam hal ini, identitas *Native Hawaiian* berfungsi sebagai *referent object* yang dianggap perlu dilindungi, sementara migrasi diposisikan sebagai faktor eksternal yang mempercepat marginalisasi yang sudah berlangsung lama.

Dengan demikian, sekuritisasi memungkinkan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana isu migrasi COFA bergerak dari ranah

kebijakan sosial ke ranah keamanan identitas. Pendekatan ini menegaskan bahwa sikap masyarakat *Native Hawaiian* terhadap migran Mikronesia tidak dapat dipahami semata-mata sebagai respons rasional terhadap kondisi material, melainkan sebagai hasil dari proses konstruksi ancaman yang berakar pada identitas, memori historis, dan relasi kuasa yang tidak setara.

1.5.3 Pendekatan Ancaman Kompetisi Sumber Daya (*Resource Competition Threat*)

Konsep ancaman kompetisi sumber daya (*resource competition threat*) merujuk pada persepsi bahwa kehadiran kelompok lain, khususnya migran, berpotensi mengurangi akses kelompok lokal terhadap sumber daya yang terbatas seperti perumahan, layanan kesehatan, pekerjaan, dan bantuan sosial. Dalam literatur ilmu sosial dan politik, ancaman ini tidak dipahami semata-mata sebagai kondisi objektif kelangkaan, melainkan sebagai ancaman yang dipersepsikan (*perceived competition*) dan dikonstruksikan secara sosial (Blalock, 1967; Esses et al., 2001). Dengan demikian, kompetisi sumber daya menjadi relevan ketika ia dimaknai sebagai ancaman terhadap keberlangsungan hidup dan posisi sosial suatu kelompok.

Blalock (1967) melalui *group threat theory* menjelaskan bahwa persepsi ancaman muncul ketika suatu kelompok merasa posisinya terancam oleh kelompok lain, terutama dalam konteks keterbatasan sumber daya dan ketimpangan struktural. Ancaman ini tidak selalu sejalan dengan data material yang objektif, tetapi dipengaruhi oleh narasi sosial, pengalaman historis, dan relasi kuasa yang membentuk cara kelompok memaknai perubahan demografis. Pendekatan ini kemudian dikembangkan oleh Esses et al. (2001), yang menekankan bahwa persepsi kompetisi sering kali bersifat simbolik dan emosional, serta berkaitan dengan rasa keadilan dan hak atas sumber daya tertentu.

Dalam konteks migrasi, ancaman kompetisi sumber daya sering beririsan dengan identitas budaya dan *politics of belonging*. Yuval-

Davis (2011) menjelaskan bahwa *politics of belonging* berkaitan dengan proses sosial dan politik yang menentukan siapa yang dianggap “berhak” atas ruang, sumber daya, dan pengakuan dalam suatu komunitas. Melalui kerangka ini, kompetisi sumber daya tidak hanya dipahami sebagai persoalan ekonomi, tetapi sebagai persoalan identitas dan keanggotaan sosial. Migran dapat diposisikan sebagai *outsiders* yang dianggap mengganggu tatanan sosial dan klaim moral kelompok lokal terhadap ruang hidup mereka.

Dalam masyarakat dengan pengalaman kolonial dan marginalisasi historis, seperti *Native Hawaiian*, persepsi kompetisi sumber daya memiliki dimensi yang lebih dalam. Keterbatasan akses terhadap tanah, perumahan, dan layanan publik tidak dipahami sebagai masalah administratif semata, tetapi sebagai kelanjutan dari proses disposisi dan ketidakadilan struktural (Goodyear-Ka’ōpua, 2014). Dalam konteks ini, kehadiran migran Mikronesia dipersepsikan bukan hanya sebagai tambahan populasi, tetapi sebagai faktor yang memperburuk ketimpangan yang telah ada, sehingga memicu konstruksi ancaman terhadap keberlanjutan identitas dan komunitas Native Hawai’ian.

Lebih lanjut, literatur migrasi menekankan bahwa tata kelola migrasi memainkan peran penting dalam membentuk persepsi kompetisi sumber daya. Kebijakan migrasi yang tidak disertai dengan distribusi sumber daya yang adil dapat memperkuat narasi bahwa migran menjadi “beban” bagi sistem kesejahteraan publik (Geddes, 2003; Huysmans, 2006). Dalam hal ini, kebijakan bukan hanya instrumen administratif, tetapi juga sumber legitimasi bagi konstruksi sosial tentang siapa yang pantas menerima perlindungan dan akses terhadap sumber daya.

Dalam penelitian ini, (COFA) diposisikan tidak hanya sebagai kebijakan migrasi, tetapi sebagai rezim dan aktor normatif yang membentuk relasi sosial di Hawai’i. Sebagai rezim, COFA menetapkan aturan, hak, dan batasan tertentu terkait mobilitas migran Mikronesia,

namun tidak sepenuhnya diiringi dengan mekanisme dukungan struktural yang memadai di tingkat lokal. Ketimpangan antara hak mobilitas dan keterbatasan jaminan kesejahteraan ini menciptakan ruang bagi persepsi kompetisi sumber daya, di mana migrasi COFA dikaitkan dengan tekanan terhadap perumahan, layanan kesehatan, dan bantuan sosial (Hezel, 2012).

Sebagai aktor normatif, COFA juga membentuk bagaimana migrasi dipersepsikan dan diperdebatkan dalam wacana publik. Migrasi yang difasilitasi oleh perjanjian internasional cenderung dipandang sebagai sesuatu yang “diimpor” oleh kebijakan eksternal, sehingga memudahkan proses pengalihan tanggung jawab struktural dari negara kepada migran. Dalam konteks ini, migran Mikronesia tidak hanya diposisikan sebagai individu, tetapi sebagai representasi dari kebijakan dan rezim yang dianggap tidak adil oleh masyarakat lokal.

Melalui lensa ancaman kompetisi sumber daya, penelitian ini memahami bahwa sikap masyarakat *Native Hawaiian* terhadap migran Mikronesia terbentuk dari interaksi antara kelangkaan sumber daya, persepsi kompetisi, identitas budaya, dan *politics of belonging*. Persepsi ancaman ini kemudian berkesinambungan dengan proses sekuritisasi, di mana kompetisi atas sumber daya diproyeksikan sebagai ancaman eksistensial terhadap keberlanjutan komunitas *Native Hawaiian*. Dengan demikian, konsep *resource competition threat* melengkapi kerangka konstruktivisme dan sekuritisasi dalam menjelaskan bagaimana kebijakan COFA berkontribusi pada pembentukan sikap sosial dan dinamika eksklusi di Hawai‘i.

1.5.4 Migrasi Post-Kolonialisme

Migrasi dalam perspektif post-kolonial tidak dipahami sebagai fenomena yang netral atau semata-mata didorong oleh faktor ekonomi individual, melainkan sebagai bagian dari relasi historis yang terbentuk melalui kolonialisme dan terus berlanjut dalam struktur global kontemporer. Pendekatan ini melihat bahwa mobilitas dari negara-negara bekas koloni menuju negara pusat kekuasaan merupakan

konsekuensi dari ketimpangan yang telah terinstitusionalisasi sejak masa kolonial, sehingga pola migrasi yang terjadi saat ini tidak dapat dilepaskan dari hubungan kekuasaan yang bersifat asimetris.

Fanon (1961) menekankan bahwa kolonialisme tidak hanya menciptakan dominasi politik, tetapi juga menghasilkan ketergantungan ekonomi dan sosial yang berkepanjangan. Dalam banyak kasus, proses dekolonisasi yang terjadi tidak sepenuhnya menghapus struktur ketimpangan tersebut, melainkan justru mentransformasikannya ke dalam bentuk relasi baru yang lebih subtil. Kondisi ini menyebabkan negara-negara bekas koloni tetap berada dalam posisi subordinat dalam sistem internasional, yang pada akhirnya mendorong mobilitas penduduk sebagai respons terhadap keterbatasan struktural yang dihadapi di dalam negeri.

Sejalan dengan itu, Hall (1990) melalui konsep diaspora dan identitas menunjukkan bahwa migrasi juga berkaitan erat dengan pembentukan identitas yang tidak bersifat tetap, melainkan cair dan hibrid. Migran dari konteks postkolonial seringkali berada dalam posisi “*in-between*”, yaitu tidak sepenuhnya menjadi bagian dari negara asal maupun negara tujuan. Posisi ini tidak hanya berdampak pada pengalaman sosial dan kultural mereka, tetapi juga berimplikasi pada bagaimana mereka diposisikan dalam struktur sosial, yang sering kali berada di pinggiran dan rentan terhadap marginalisasi.

Dalam perkembangan yang lebih kontemporer, Achiume (2019) menawarkan perspektif yang lebih kritis dengan memandang migrasi sebagai bagian dari dinamika dekolonisasi yang belum selesai. Ia berargumen bahwa pergerakan manusia dari *Global South* ke *Global North* tidak dapat dilepaskan dari sejarah eksploitasi dan ekstraksi sumber daya yang dilakukan oleh kekuatan kolonial, sehingga mobilitas tersebut merefleksikan hubungan timbal balik yang tidak seimbang. Dengan demikian, migrasi tidak hanya mencerminkan pilihan individu, tetapi juga menunjukkan adanya keterkaitan historis yang terus

menghubungkan wilayah-wilayah tersebut dalam kerangka ketergantungan global.

Dalam konteks tertentu, relasi historis tersebut juga dilembagakan melalui berbagai bentuk pengelolaan wilayah pascakolonial yang difasilitasi oleh kerangka institusional internasional. Keterlibatan negara kolonial dalam mengelola wilayah non-merdeka, termasuk melalui mekanisme perwalian internasional, sering kali menghasilkan ketergantungan struktural yang berlanjut meskipun secara formal telah terjadi proses dekolonisasi. Dengan demikian, mobilitas penduduk yang muncul tidak semata-mata mencerminkan pilihan individual, tetapi juga merupakan konsekuensi dari keterhubungan historis yang dibentuk melalui relasi kekuasaan tersebut

Lebih lanjut, Adamson (2025) menyoroti bahwa tata kelola migrasi modern pada dasarnya masih dibentuk oleh warisan imperialisme, di mana negara tetap memainkan peran sentral dalam mengatur mobilitas sekaligus menentukan batas-batas keanggotaan politik. Dalam hal ini, kebijakan migrasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai mekanisme yang mereproduksi relasi kekuasaan antara pusat dan periferi. Perspektif ini diperkuat oleh Hanlon (2024) yang mengidentifikasi adanya fenomena *colonial amnesia*, yaitu kecenderungan dalam studi dan kebijakan migrasi untuk mengabaikan peran kolonialisme dalam membentuk pola migrasi kontemporer, sehingga ketimpangan yang ada sering kali dipahami sebagai sesuatu yang natural dan tidak historis.

Dengan demikian, perspektif migrasi pos-tkolonial memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap migrasi sebagai bagian dari dinamika kekuasaan global yang bersifat historis dan struktural. Pendekatan ini tidak hanya menjelaskan mengapa mobilitas terjadi, tetapi juga membuka ruang untuk melihat bagaimana relasi yang terbentuk di masa lalu terus direproduksi dalam berbagai

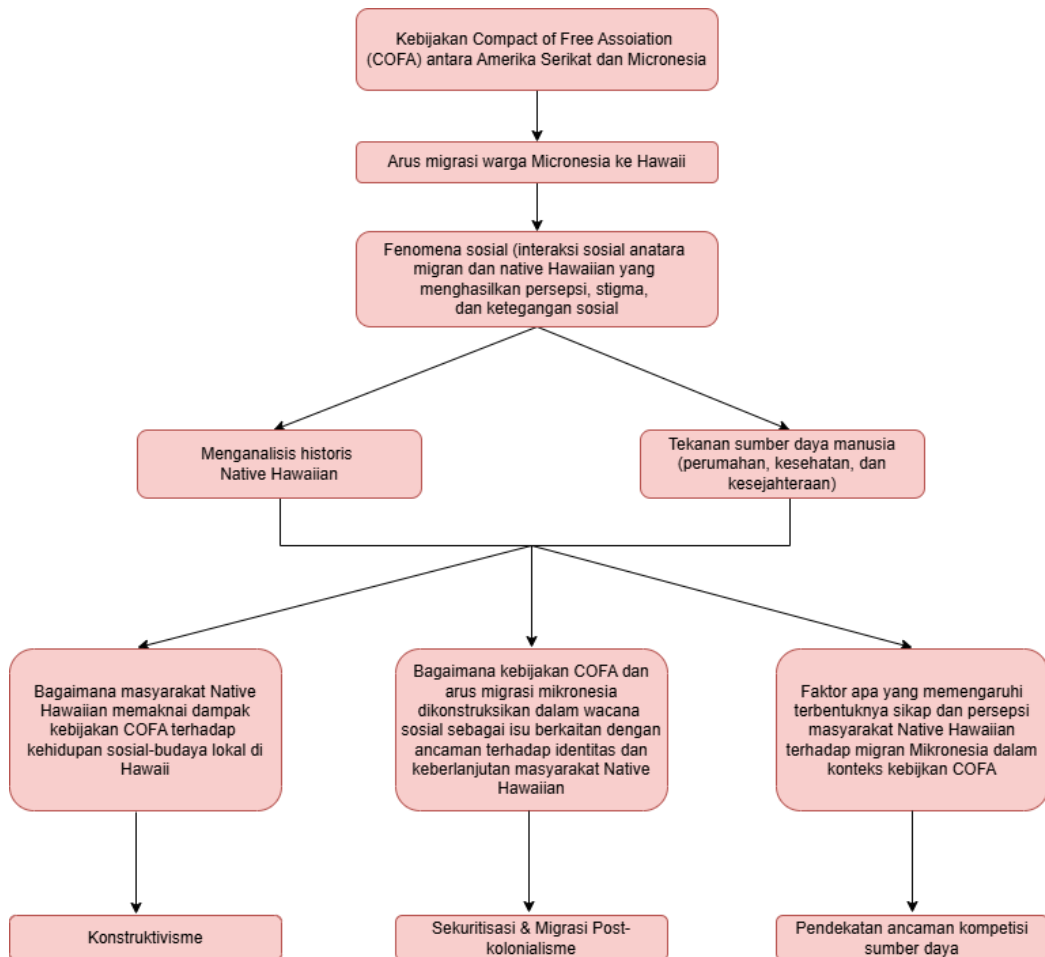
bentuk interaksi kontemporer, termasuk dalam pengaturan mobilitas, distribusi hak, serta posisi sosial migran di negara tujuan.

1.6 Asumsi Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa kebijakan migrasi internasional tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum dan administratif, tetapi juga sebagai praktik sosial yang membentuk makna, identitas, dan relasi antar kelompok dalam masyarakat penerima. Kebijakan *Compact of Free Association* (COFA) dipahami sebagai bagian dari konstruksi sosial yang memengaruhi cara masyarakat *Native Hawaiian* memaknai kehadiran migran Mikronesia, baik melalui wacana publik, interaksi sosial, maupun pengalaman historis yang berkembang. Dalam kerangka ini, norma kemanusiaan universal yang menjadi dasar tata kelola migrasi global diasumsikan tidak secara otomatis diterapkan secara utuh di tingkat lokal, melainkan mengalami proses adaptasi dan penyesuaian sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan politik setempat. Konteks lokal tersebut dalam penelitian ini dipahami sebagai ruang sosial yang dibentuk oleh pengalaman kolonialisme, kehilangan kedaulatan, dan marginalisasi struktural yang dialami masyarakat *Native Hawaiian*.

Selain itu, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa persepsi dan sikap masyarakat Hawai'i terhadap migran COFA dibentuk oleh interaksi kompleks antara faktor ekonomi, konstruksi identitas budaya, serta politik kelekatan (*politics of belonging*) yang menentukan siapa yang dianggap sebagai bagian dari komunitas dan siapa yang diposisikan sebagai pihak luar. Dengan demikian, dinamika sosial yang muncul tidak semata-mata merupakan konsekuensi langsung dari kebijakan COFA, tetapi juga hasil dari proses negosiasi makna dan relasi kekuasaan di tingkat lokal. Asumsi ini menjadi landasan berpikir peneliti dalam menelusuri bagaimana kebijakan COFA dimaknai, dijalankan, dan berdampak terhadap hubungan sosial antara masyarakat Hawai'i dan komunitas migran Mikronesia dalam periode penelitian.

1.7 Kerangka Analisis



Kerangka analisis dalam penelitian ini berangkat dari kebijakan *Compact of Free Association* (COFA) antara Amerika Serikat dan negara-negara Mikronesia sebagai sebuah kebijakan struktural yang memungkinkan mobilitas bebas warga Mikronesia ke wilayah Amerika Serikat, termasuk Hawai‘i. Kebijakan ini tidak hanya bersifat administratif dan legal, tetapi juga menghasilkan arus migrasi yang signifikan ke Hawai‘i sebagai wilayah penerima, sehingga membentuk dinamika sosial baru dalam masyarakat lokal.

Arus migrasi warga Mikronesia tersebut kemudian berinteraksi dengan konteks sosial Hawai‘i yang memiliki sejarah panjang marginalisasi masyarakat *Native Hawaiian* akibat kolonialisme, dan pembangunan yang menyingkirkan

kepentingan masyarakat adat. Dalam situasi ini, migrasi tidak hadir dalam ruang yang netral, melainkan masuk ke dalam struktur sosial yang sudah timpang, di mana *Native Hawaiian* telah lebih dahulu mengalami keterbatasan akses terhadap tanah, perumahan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Interaksi antara migran Mikronesia dan masyarakat *Native Hawaiian* kemudian memunculkan fenomena sosial berupa pembentukan persepsi, stigma, serta ketegangan sosial. Fenomena ini diperkuat oleh tekanan terhadap sumber daya manusia, khususnya dalam sektor perumahan, layanan kesehatan, dan program kesejahteraan, yang semakin kompetitif seiring bertambahnya populasi. Kondisi tersebut menciptakan ruang bagi munculnya narasi sosial yang mengaitkan migrasi dengan penurunan kualitas hidup dan keberlanjutan sosial masyarakat lokal.

Dalam kerangka ini, penelitian menganalisis bagaimana masyarakat *Native Hawaiian* memaknai dampak sosial dan budaya dari kebijakan COFA melalui pendekatan konstruktivisme. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana makna, identitas, dan kepentingan *Native Hawaiian* tidak bersifat *given*, melainkan dikonstruksikan melalui pengalaman historis, interaksi sosial, dan diskursus yang berkembang di ruang publik.

Selanjutnya, penelitian ini juga melihat bagaimana COFA dan arus migrasi Mikronesia dikonstruksikan dalam wacana sosial sebagai ancaman terhadap identitas dan keberlanjutan *Native Hawaiian* dengan menggunakan perspektif sekritisasi. Melalui pendekatan ini, migrasi dipahami bukan semata sebagai fenomena demografis.

Terakhir, penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang membentuk sikap dan persepsi masyarakat *Native Hawaiian* terhadap migran Mikronesia dengan menggunakan pendekatan ancaman dan kompetisi sumber daya. Pendekatan ini membantu menjelaskan bagaimana keterbatasan sumber daya, ketimpangan struktural, serta pengalaman marginalisasi mendorong munculnya persepsi kompetitif antara kelompok lokal dan migran, yang kemudian memengaruhi sikap sosial dan relasi antar kelompok.

Secara keseluruhan, kerangka analisis ini menempatkan kebijakan COFA sebagai faktor struktural utama yang memicu dinamika migrasi, yang kemudian

berinteraksi dengan konteks historis dan sosial Hawai‘i, serta dikonstruksikan melalui berbagai kerangka makna dan wacana yang membentuk sikap masyarakat *Native Hawaiian* terhadap migran Mikronesia.